

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG

## 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**

**DATA DAN INFORMASI  
KEMISKINAN  
KABUPATEN SOPPENG  
2017**

<https://soppengkab.bps.go.id>

# **DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2017**

**ISBN** : 978-602-5551-25-3  
**Nomor Publikasi** : 73120.1901  
**Katalog BPS** : 3205014.7312

**Ukuran** : 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : viii + 52 halaman

**Pembina** : Ir. H. Rustan  
**Pengarah** : Sukri, SE.

**Penyusun** : Muhammad Zaky Nafi', S.ST  
**Gambar Kulit** : Muhammad Zaky Nafi', S.ST  
**Lay Out** : Muhammad Zaky Nafi', S.ST

**Diterbitkan oleh :**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng**

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG**  
**Jl. Salotungo, Watansoppeng, 90812**  
**Telp: (0484) 21060, Fax: (0484) 23377**  
**Website: <http://soppengkab.bps.go.id>**  
**Email: [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id)**



## KATA PENGANTAR

Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng 2017 merupakan publikasi pertama yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Soppeng khusus membahas mengenai kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Watansoppeng, Desember 2018  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG  
Kepala,

**IR. H. RUSTAN**  
NIP: 19661115 199301 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOMOR KATALOG</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	Vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	2
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
<b>BAB II     KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN</b>	5
2.1 Metodologi Penghitungan Kemiskinan.....	5
2.1.1 Konsep.....	5
2.1.2 Sumber Data.....	6
2.1.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan.....	6
2.2 Indikator Kemiskinan.....	7
2.3 Konsep dan Definisi Indkator lain terkait kemiskinan .....	9
2.3.1 Pendidikan .....	9
2.3.2 Ketenagakerjaan.....	10
2.3.3 Sektor Ekonomi.....	11

	Halaman
2.3.4 Kesehatan.....	11
2.3.5 Fasilitas Perumahan.....	13
2.3.6 Program Pemerintah.....	13
<b>BAB III</b>	
<b>KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN</b>	
<b>SOPPENG</b>	15
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	15
3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Kemiskinan.....	15
3.1.2 Garis Kemiskinan.....	17
3.1.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	17
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin.....	19
3.2.1 Pendidikan.....	19
3.2.2 Ketenagakerjaan.....	24
3.2.3 Kesehatan.....	28
3.2.4 Pengeluaran Perkapita Perbulan.....	30
3.2.5 Fasilitas Perumahan.....	33
3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan.....	35
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b>	40
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P <sub>1</sub> , P <sub>2</sub> , dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	46
Tabel 2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	47
Tabel 3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Sektor Bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	48
Tabel 4	Persentase Perempuan berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Balita di Rumah Tangga Miskin yang telah Diimunisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	49
Tabel 5	Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	50
Tabel 6	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	51
Tabel 7	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	16
Gambar 1.2	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan, 2013-2017	17
Gambar 1.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Soppeng, 2013-2017	19
Gambar 2.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	21
Gambar 2.2	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	22
Gambar 2.3	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	23
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	27
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	28
Gambar 4	Persentase Perempuan Berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	30
Gambar 5	Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	32
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	34
Gambar 7.1	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	36



Gambar 7.2	Persentase Rata-rata Jumlah Beras Rasin yang Dibeli oleh Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	37
Gambar 7.3	Persentase Rata-rata Harga Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah tangga Miskin di Kabupaten Soppeng, 2013-2017	38

<https://soppengkab.bps.go.id>

Tahukah Kamu?



Pada tahun 2017,  
**8,29%** dari penduduk  
**Kabupaten Soppeng**  
tercatat sebagai  
**penduduk miskin**

\*Garis kemiskinan Kab. Soppeng tahun 2017 sebesar  
Rp 225.936,00 per kapita per bulan

Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki  
rata-rata pengeluaran perkapita per bulan  
dibawah Garis Kemiskinan

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di tengah kekayaan potensi alamnya yang melimpah, ternyata Indonesia masih dihadapkan dengan sebuah masalah klasik, yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan memang masih menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Hingga bulan Maret 2017, tercatat masih ada sebanyak 10,64 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Bahkan di wilayah Indonesia timur seperti Papua, Papua Barat dan NTT, persentase penduduk miskinnya mencapai lebih dari 20 persen.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka tidak heran jika program pengentasan kemiskinan selalu menjadi program utama, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada era Presiden Joko Widodo misalnya, salah satu dari tiga kebijakan fundamental pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK adalah subsidi tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut tentunya memerlukan data pendukung yang lengkap, akurat dan terpercaya.

Disinilah terdapat peran BPS, yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengumpulkan data-data kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Soppeng. Data kemiskinan yang lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah dalam membuat perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu, dalam rangka menyediakan data-data mengenai kemiskinan di Kabupaten Soppeng, maka BPS Kabupaten Soppeng menerbitkan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2017. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah Kabupaten Soppeng dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2013-2017.
- b. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2013-2017.

## **1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan**

Ruang lingkup analisis publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan adalah data yang dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013-2017. Tingkat kemiskinan yang dianalisis merupakan kondisi bulan September tahun 2013-2014 yang didapatkan dari data Susenas Modul Konsumsi Gabungan Triwulan I-IV. Sedangkan untuk tahun 2015-2017, tingkat kemiskinan yang dianalisis merupakan kondisi bulan Maret yang didapatkan dari data Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran Semester I (Maret).

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.

## BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN

Bab ini berisi metodologi penghitungan kemiskinan, indikator kemiskinan, serta beberapa konsep dan definisi.

## BAB III KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN SOPPENG

Bab ini menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, akan dijelaskan kembali poin-poin penting mengenai fenomena kemiskinan di Kabupaten Soppeng, sehingga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator-indikator kemiskinan yang ada di Kabupaten Soppeng.

Semua indikator di atas diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi kemiskinan yang ada.



**0,36%**

Pada tahun 2017,  
jumlah penduduk  
miskin **Soppeng**  
turun sebesar **0,36%**  
disbanding tahun 2016  
yaitu dari **19.120** jiwa  
menjadi **18.760** jiwa  
pada tahun 2017

## BAB II

# Konsep Penghitungan Kemiskinan

### 2.1 Metodologi Penghitungan Kemiskinan

- Kemiskinan

Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **kemiskinan absolut** dan **kemiskinan relatif**. Kemiskinan absolut diartikan sebagai deprivasi atau kekurangan atas kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relative diartikan sebagai ketimpangan ekonomi, yang diukur dengan kelas pendapatan, antara kelompok masyarakat dengan kelas pendapatan terendah, menengah, dan tertinggi (Irawan, et al., 2017).

- Garis Kemiskinan

Sebelum menghitung jumlah penduduk miskin, maka langkah pertama adalah menentukan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

### **2.1.2 Sumber Data**

Sumber data utama yang dipakai adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada periode tahun 2013-2014, data Susenas yang digunakan adalah Susenas modul konsumsi triwulan I, II, III dan IV. Khusus tahun 2014, menggunakan data Susenas modul konsumsi triwulan I, II, III, tahun 2014 dan triwulan IV tahun 2013. Untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota maka dilakukan penggabungan keempat set data tersebut (triwulan I, II, III, dan IV), sehingga sampel rumah tangga cukup untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2017, data yang digunakan adalah data Susenas konsumsi pengeluaran bulan Maret (semester I) yang jumlah sampelnya sudah mencukupi untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Sedangkan penimbang yang digunakan adalah hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk tahun 2010.

### **2.1.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahapan dalam menghitung garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah sebagai berikut:

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yaitu Garis kemiskinan pada periode lalu yang diinflasi dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).



Garis kemiskinan makanan merupakan penjumlahan nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

Sedangkan garis Kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan nilai garis kemiskinan.

## 2.2 Indikator Kemiskinan

Menurut Foster, Greer, dan Thorbecke (1984, dalam Irawan, et al., 2017), ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut, baik dengan pengukuran berbasis pendapatan maupun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi pengeluaran, yaitu:

- *Head-Count Index* ( $P_0$ )

Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditentukan, atau disebut tingkat insiden kemiskinan, atau *head-count index* ( $P_0$ ), Indeks  $P_0$  hanya dapat memberikan informasi

mengenai proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Keterbatasan indeks P0 adalah indeks ini tidak bisa menjelaskan seberapa miskin atau sengsara para penduduk yang dikategorikan miskin tersebut.

- *Poverty Gap Index (P<sub>1</sub>)*

Indeks ketimpangan kemiskinan, atau *poverty gap index (P<sub>1</sub>)*, Indeks P<sub>1</sub> adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tidak seperti indeks P<sub>0</sub> yang hanya memberikan informasi persentase dan jumlah penduduk miskin, indeks P<sub>1</sub> bisa mengindikasikan perubahan derajat kemiskinan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P<sub>1</sub>, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Akan tetapi, indeks P<sub>1</sub> ini masih mempunyai kekurangan, yaitu tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) antara penduduk miskin, sehingga tidak bisa mendeteksi keparahan kemiskinan (*poverty severity*).

- *Poverty Severity Index (P<sub>2</sub>)*

Indeks P<sub>2</sub> merupakan indeks yang bisa memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ketiga indeks kemiskinan tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus FGT (Foster, Greer, Thorbecke), sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan :

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah GK

$n$  = jumlah penduduk

$\alpha$  = parameter ukuran sensitivitas kemiskinan, dimana :

$\alpha = 0$ , untuk menghitung *head count index* ( $P_0$ ),

$\alpha = 1$ , untuk menghitung *poverty gap index* ( $P_1$ ),

$\alpha = 2$ , untuk menghitung *poverty severity index* ( $P_2$ ).

## 2.3 Konsep dan Definisi Indikator lain terkait kemiskinan

### 2.3.1 Sektor Pendidikan

- **Pendidikan yang ditamatkan** adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah,

mempunyai ijazah SD atau SMP dan mempunyai ijazah minimal SMA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.

- **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15 – 24 tahun dan 15 – 55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

### 2.3.2 Sektor Ketenagakerjaan

- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas.
- **Bekerja di sektor informal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.
- **Bekerja di sektor formal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan

utama adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

- **Bekerja di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sector pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
- **Bekerja bukan di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian.
- **Tidak bekerja** adalah penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan)

### 2.3.3 Sektor Ekonomi (Pengeluaran Per Kapita)

**Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan** adalah total pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

### 2.3.4 Sektor Kesehatan

- **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh bayi di bawah lima tahun (balita) dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.
- **Persentase balita yang telah diimunisasi** adalah proporsi penduduk berusia lima tahun ke bawah (balita) di rumah tangga miskin yang setidaknya sudah mendapatkan salah satu dari imunisasi

Bacillus calmette guerin (BCG); difteripertusis- tetanus (DPT); polio, campak/morbili, dan hepatitis B.

- **Pengguna alat kontrasepsi**, terdapat perbedaan konsep definisi antara tahun 2013-2014 dan tahun 2015-2017. Untuk data tahun 2013-2014, yang dimaksud pengguna alat kontrasepsi adalah proporsi perempuan di rumah tangga miskin berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin, cerai hidup, atau cerai mati dan pernah/sedang menggunakan alat/cara KB. Sedangkan untuk tahun 2015-2017, yang dimaksud pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan di rumah tangga miskin berumur 15-49 tahun berstatus kawin, cerai hidup, cerai mati atau pasangannya yang menggunakan alat keluarga berencana (KB) atau cara tradisional guna menunda kehamilan.

Alat KB atau cara tradisional meliputi:

- Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW
- Sterilisasi pria/vasektomi/MOP
- IUD/AKDR/spiral
- Suntikan
- Susuk KB/implan
- Pil
- Kondom pria/karet KB
- Intravag/kondom wanita/diafragma
- Metode menyusui alami
- Pantang berkala/kalender
- Lainnya

### 2.3.5 Sektor Perumahan (Fasilitas)

- **Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari:
  - Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah  $\geq 10$  meter.
  - Air terlindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah  $< 10$  meter/ air tidak sustain (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.
- **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

### 2.3.6 Program Pemerintah

**Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra)** adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.



Pada tahun 2017,  
di Kabupaten Soppeng  
terdapat **73,56%**  
rumah tangga miskin  
yang sudah  
menggunakan  
air layak

**Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari:

- Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah  $\geq 10$  meter.
- Air terlindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah  $< 10$  meter/ air tidak sustain (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.



# BAB III

## KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG

### 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

#### 3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

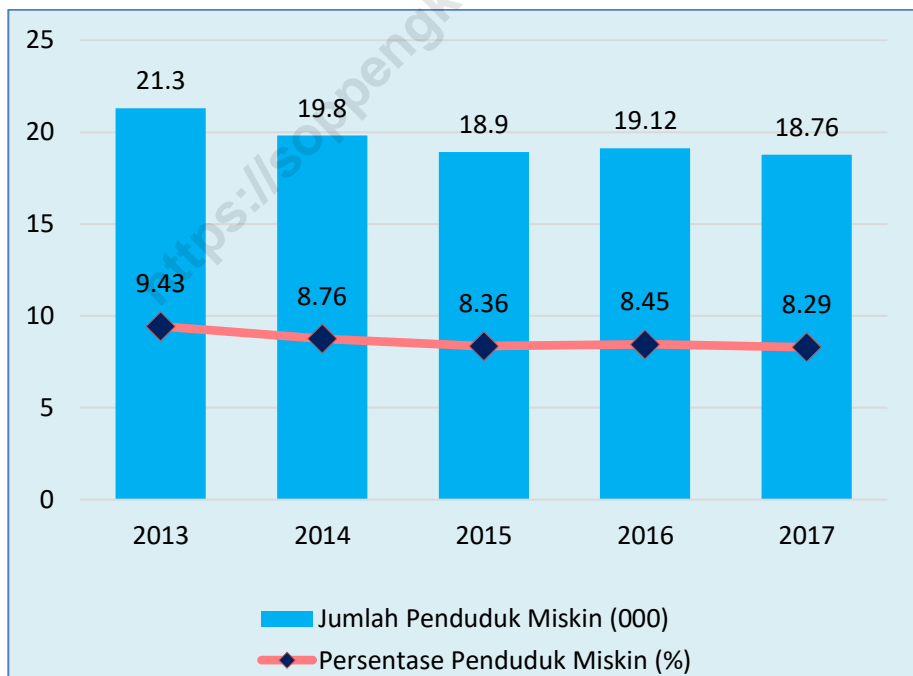
Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km<sup>2</sup>. Seperti halnya kabupaten dan kota lain, Kabupaten Soppeng juga menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan.

Fenomena kemiskinan secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator kemiskinan. Pertama, dengan melihat jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $P_0$ ). Kedua, dengan melihat rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan ( $P_1$ ). Ketiga, dengan melihat sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin ( $P_2$ ).

Pada tahun 2017, masih ada sekitar 18.760 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng atau sekitar 8,29 persen. Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp 225.936,00/orang/bulan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin nomor tujuh paling sedikit jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lainnya. Sama halnya jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, dibandingkan

dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Soppeng menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling sedikit nomor tujuh pula. (lihat Tabel 1).

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) Kabupaten Soppeng tahun 2013-2017. Terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan menurun. Jika dilihat dari periode tahun 2013-2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 21.300 orang menjadi 18.760 orang. Pada periode tahun tersebut, persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) juga mengalami penurunan dari 9,43 persen menjadi 8,29 persen.

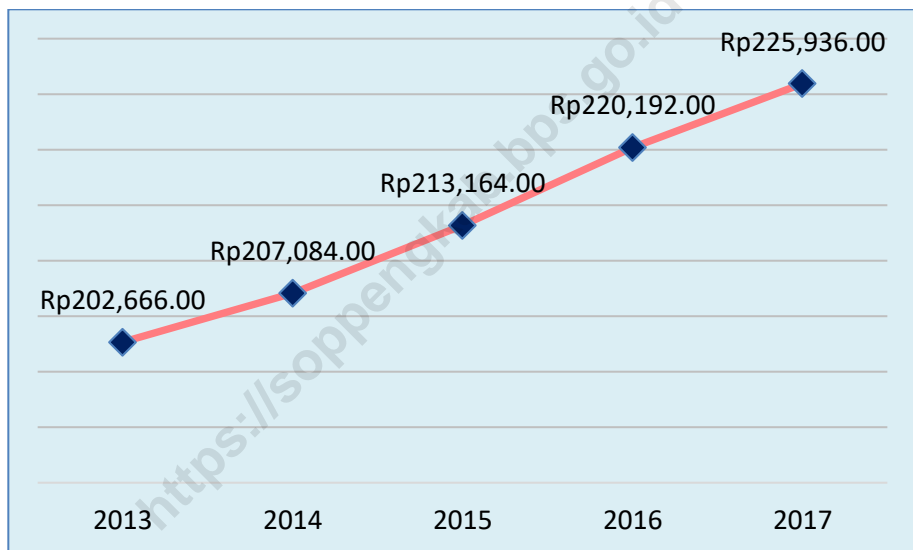


Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota 2013-2017

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

### 3.1.2 Garis Kemiskinan

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai nilai Rp 225.936/orang/bulan, angka tersebut merupakan angka garis kemiskinan paling tinggi dalam lima tahun terakhir.



Gambar 1.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

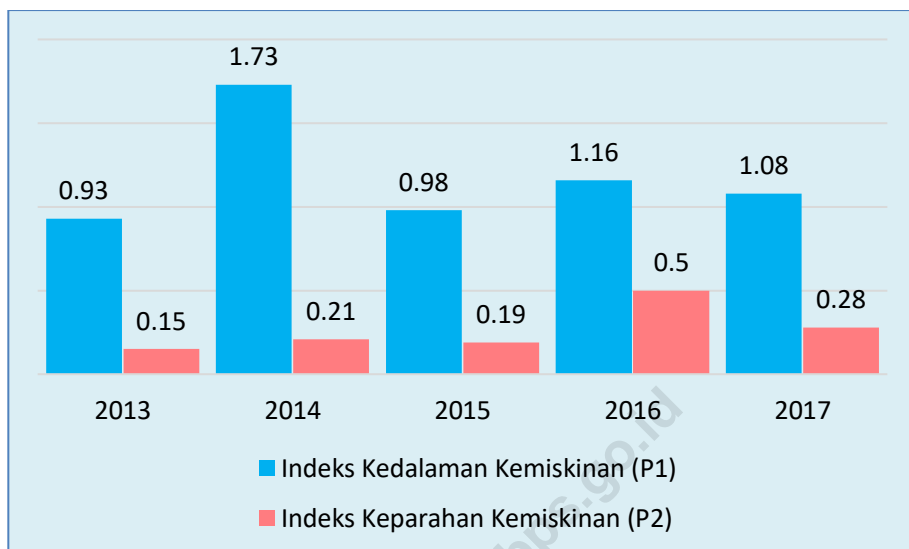
### 3.1.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indikator selanjutnya yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah *poverty gap index* atau indeks ketimpangan kemiskinan ( $P_1$ ) dan *poverty severity index* atau indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ). Gambar 1.3 menjelaskan bahwa angka indeks ketimpangan kemiskinan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif dan

mencapai angka 1,08 persen pada tahun 2017. Ini berarti bahwa kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan relatif kecil, yaitu hanya sebesar 1,08 persen.

Berbeda dengan  $P_0$  yang hanya menganggap semua orang miskin sama miskinnya,  $P_1$  dapat mengukur intensitas atau kedalaman kemiskinan dengan melihat sejauh mana jarak pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai  $P_1$  ini penting untuk diketahui karena dapat menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Semakin tinggi  $P_1$ , maka semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan. Ini berarti pemerintah akan semakin membutuhkan usaha yang lebih untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.

Pada periode tahun 2013-2017,  $P_2$  juga menunjukkan pola yang sama dengan  $P_1$ . Walaupun sempat mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2017 nilai  $P_2$  lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai angka 0,28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin tidak begitu timpang.



Gambar 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

## 3.2 Karakteristik Penduduk Miskin

### 3.2.1 Pendidikan

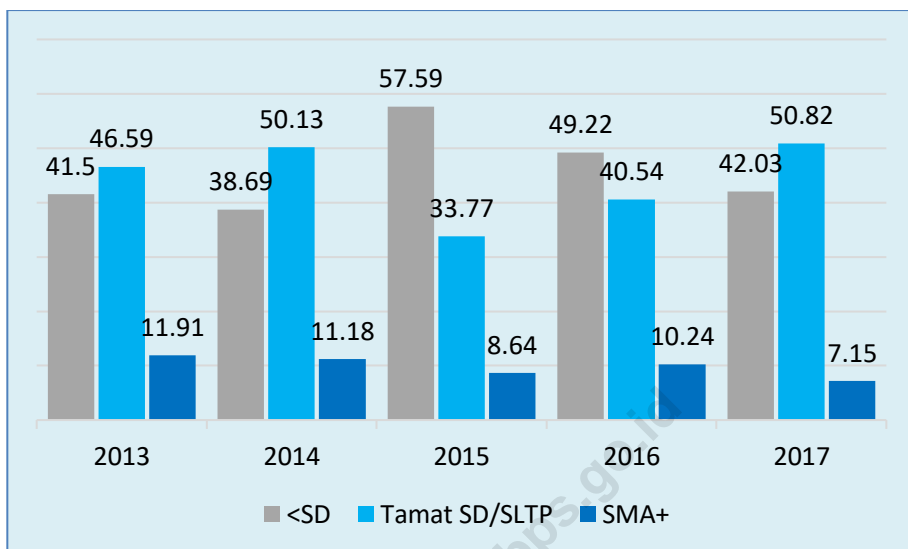
Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Todaro (2003, dalam Cahyo, 2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan.

Haughton dan Khander (2009) membagi faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi beberapa karakteristik, salah satunya adalah karakteristik sosial pada level rumah tangga dan individu. Karakteristik pendidikan, seperti tingkat pendidikan, ketersediaan pelayanan pendidikan, melek huruf, dan rata-rata lamanya sekolah penduduk dewasa di atas lima belas tahun, menjadi salah satu karakteristik sosial yang menjadi penyebab kemiskinan.

Pada tahun 2017, banyak penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng dengan tingkat Pendidikan tamat SD atau SMP, yaitu sebesar 50,82 persen. Sedangkan penduduk yang berpendidikan tidak tamat SD masih ada sebanyak 42,03 persen, dan 7,15 persen lainnya berpendidikan tamat SMA ke atas.

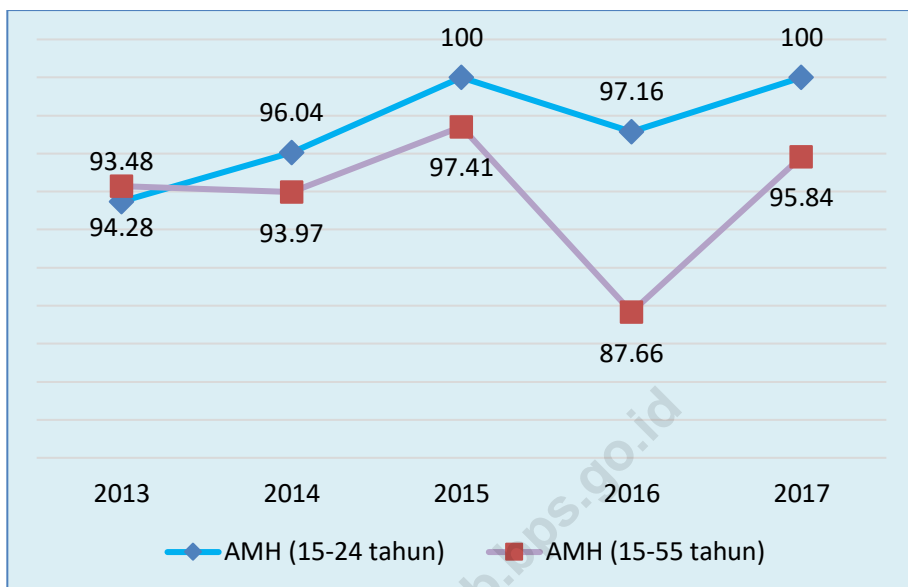
Tingkat pendidikan penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD di Kabupaten Soppeng lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal tamat SD di Kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (lihat Tabel 2).

Pada periode tahun 2013-2017, seperti yang terlihat pada gambar 2.1, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas baik yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD atau SMP, maupun minimal tamat SMA, masih fluktuatif di tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD pada tahun 2017 mencapai angka 42,03 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang hanya 50,82 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan minimal tamat SMA mengalami penurunan pada tahun 2017 persentasenya hanya sebesar 7,15 persen.



Gambar 2.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

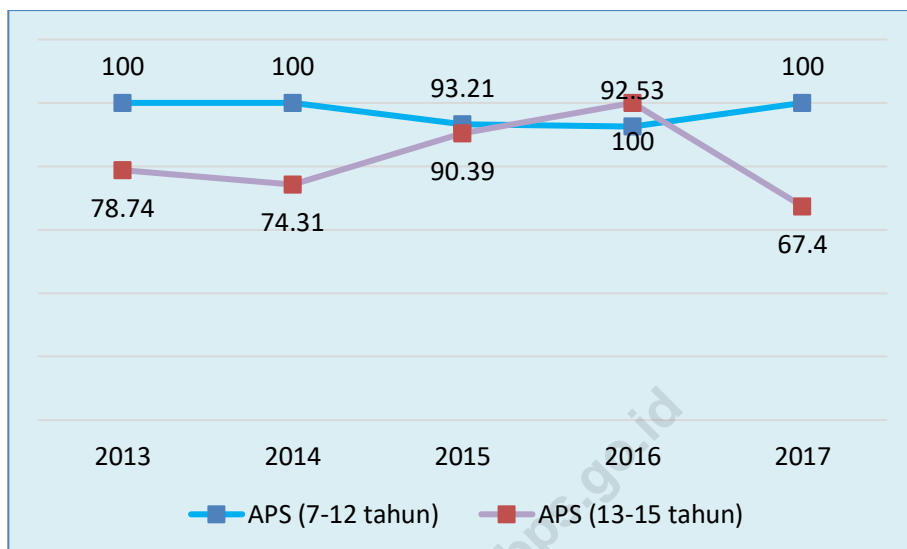
Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa tren Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2013-2017 terlihat masih fluktuatif, baik golongan umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun. Akan tetapi, terdapat satu tren positif pada AMH golongan umur 15-24 tahun pada tahun 2013-2015. Pada tahun 2015 dan 2017 AMH golongan umur 15-24 tahun mencapai angka 100 persen. Hal ini merupakan modal yang bagus bagi penduduk miskin usia 15-24 tahun yang akan masuk ke dunia kerja agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.



Gambar 2.2 Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Persentase APS penduduk miskin berumur 7-12 tahun atau setara usia sekolah dasar, pada periode tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2013, 2014 dan 2017, persentasenya mencapai 100 persen yang berarti semua penduduk miskin yang berumur 7-12 tahun di Kabupaten Soppeng semuanya bersekolah. Sedangkan untuk penduduk miskin berumur 13-15 tahun atau setara usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), persentase APS pada periode tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan empat tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, APS penduduk miskin berumur 13-15 tahun bahkan sempat mencapai angka 100 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017, angkanya turun menjadi 67,4 persen. Ini berarti ada sebanyak 67,4 persen penduduk miskin berumur 13-15 tahun yang masih bersekolah.





Gambar 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Jika dilihat dua tahun terakhir, rumah tangga miskin sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Bahkan persentase APS untuk golongan umur 7-12 tahun sudah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Akan tetapi, ternyata masih ada selisih yang cukup besar antara persentase APS golongan umur 13-15 tahun dan APS golongan umur 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada anak berumur 7-12 tahun yang berada di rumah tangga miskin yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs. Hal ini dikarenakan masih ada desa-desa di Kabupaten Soppeng yang tidak mempunyai SMP/MTs. Jika dilihat dari data BPS Kabupaten Soppeng, pada tahun 2017 hanya ada sebanyak 38 SMP dan 31 MTs yang ada di Kabupaten Soppeng. Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah SD/MI yang ada di Kabupaten Soppeng yang mencapai 270 sekolah. Ditambah lagi dengan akses jalan antar desa yang

masih sulit yang juga dapat menjadi alasan untuk menyekolahkan anak mereka ke SMP di desa terdekat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu memperhatikan kondisi tersebut. Dalam UU. No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah perlu menyadarkan masyarakat lagi akan pentingnya program wajib belajar 9 tahun ini. Tentunya hal tersebut dibarengi dengan menambah SMP/MTs khususnya di desa-desa dengan akses jalan yang masih sulit.

Selain itu pemerintah perlu memperhatikan lagi kemampuan penduduk miskin untuk membiayai sekolah anak mereka. Karena selain kurangnya fasilitas SMP/MTs di daerahnya, alasan lain yang membuat anak dalam rumah tangga miskin tidak melanjutkan pendidikannya adalah dikarenakan masalah ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah. Sesuai dengan pasal 11 Ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Program beasiswa seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan yang lainnya, perlu direncanakan sebaik mungkin agar tepat sasaran, yaitu untuk rumah tangga miskin yang tidak bisa membiayai sekolah anaknya. Karena jika rumah tangga miskin dapat memperbaiki pendidikan anak mereka, maka peluang untuk keluar dari jurang kemiskinan akan terbuka.

### **3.2.2 Ketenagakerjaan**

Haughton dan Khander (2009) memasukkan karakteristik ekonomi pada level rumah tangga dan individu sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan. Karakteristik ekonomi tersebut salah satunya adalah

permasalahan ketenagakerjaan. Dian Octaviani (2001, dalam Wijayanto 2010) menyatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, penduduk miskin di Kabupaten Soppeng banyak yang bekerja di sektor informal. Hal tersebut dapat diketahui dari perbedaan antara persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal dan informal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 61,14 persen, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 4,87 persen.

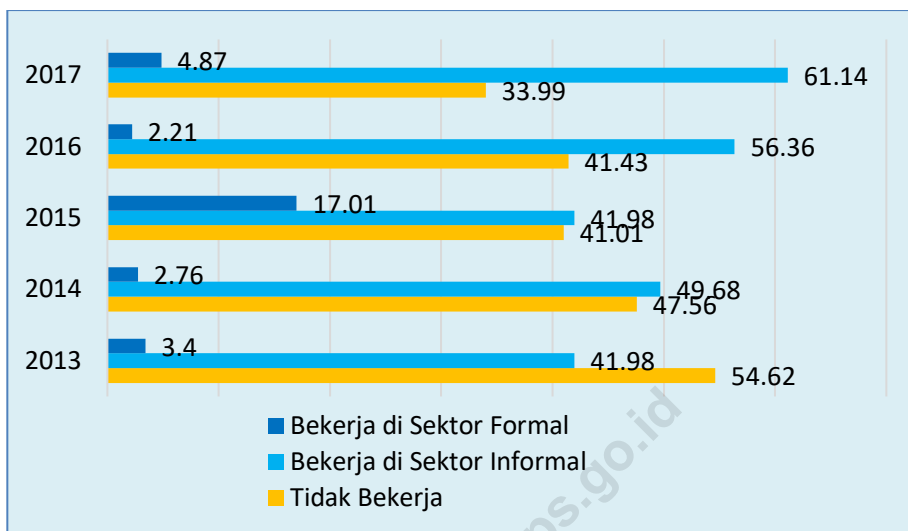
Selain itu, dapat juga diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Soppeng bekerja di sektor pertanian daripada bekerja bukan di sektor pertanian. Sebanyak 55,74 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya. Sedangkan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian hanya sebanyak 10,27 persen saja (lihat Tabel 3).

Jika dilihat dari lima tahun terakhir sesuai Gambar 3.1, karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Soppeng umumnya masih bekerja di sektor informal daripada bekerja di sektor formal, hanya segelintir orang saja yang bekerja di sektor formal yang angkanya tidak pernah lebih dari 18 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Di sisi

lain, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran dari tahun 2013-2015 terlihat terus mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2017 angkanya naik lagi menjadi 41,43 persen.

Pada Gambar 3.1, terdapat hal yang menarik antara tren penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Keduanya mempunyai tren yang saling bertolak belakang pada beberapa tahun. Misalnya pada tahun 2013-2014, dimana persentase penduduk yang bekerja di sektor informal terus mengalami kenaikan, sebaliknya penduduk yang tidak bekerja terus mengalami penurunan. Begitu juga ketika tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mengalami kenaikan juga, tapi penduduk yang tidak bekerja juga mengalami penurunan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor informal dapat menjadi alternatif pekerjaan dan dapat menampung penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill yang cukup untuk bekerja di sektor formal agar tidak menganggur. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Fenomena tersebut dapat menjadi gambaran bagi pemerintah Kabupaten Soppeng agar lebih memperhatikan nasib para pekerja sektor informal dengan cara melakukan pembinaan kegiatan usaha pekerja sektor informal agar bisa berkembang lebih baik lagi.

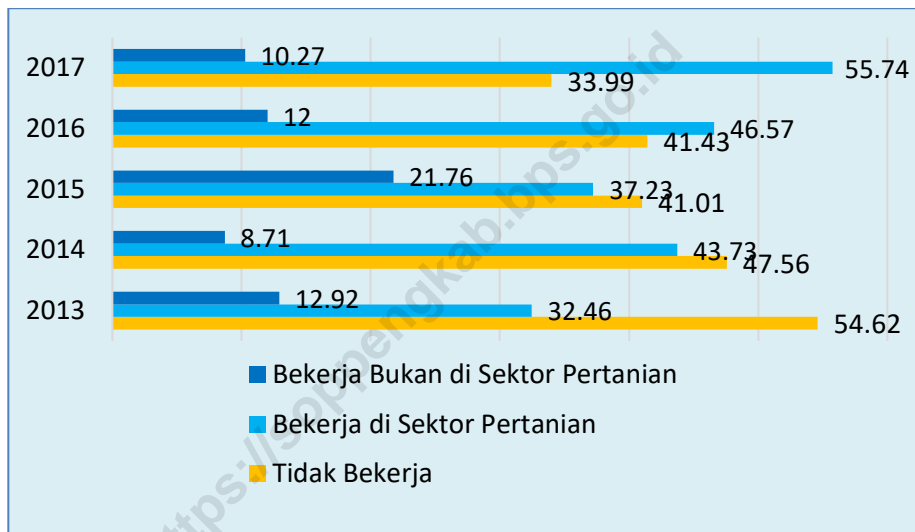


Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Sesuai yang terlihat pada Gambar 3.2, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng umumnya bekerja di sektor pertanian, hanya segelintir orang saja yang bekerja bukan di sektor pertanian yang angkanya tidak pernah lebih dari 25 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 mengalami mencapai 55,74 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2017 penduduk yang bekerja bukan di sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 10,27 persen.

Di Kabupaten Soppeng, pekerjaan di sektor pertanian umumnya masih dikerjakan sendiri maupun dibantu anggota keluarga lain yang tidak dibayar. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian berhubungan erat dengan sektor informal. Hal tersebut tergambar dalam tren yang sama antara persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sektor

informal pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. Sama halnya dengan sektor informal, sektor pertanian juga mempunyai peranan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian di Kabupaten Soppeng masih dijalankan dengan tradisional sehingga bisa dikerjakan oleh orang yang berpendidikan rendah maupun orang yang belum terampil bekerja. Oleh karena itu, selain memperhatikan sektor informal, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor pertanian.



Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja, di Soppeng Tahun 2013-2017

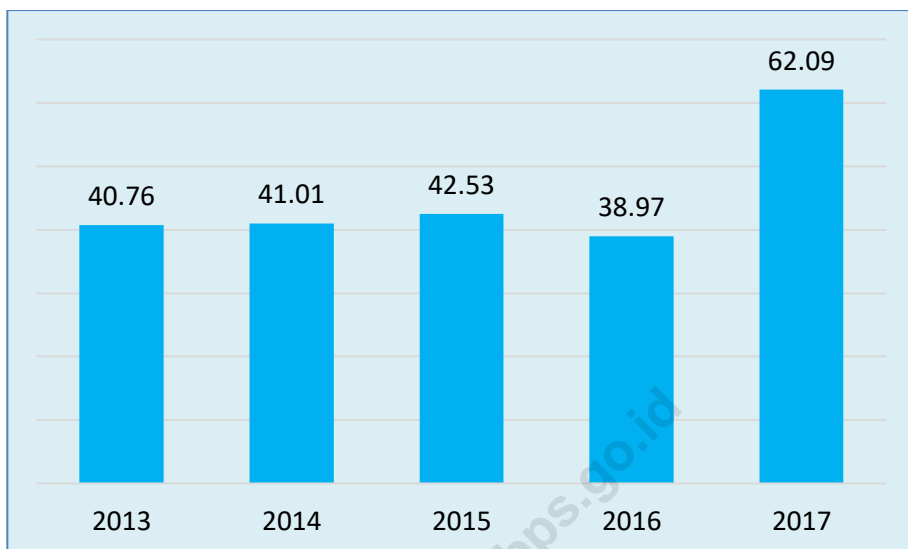
### 3.2.3 Kesehatan

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak. Karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi (BPS, 2008). Hal tersebut bisa terjadi karena banyak rumah tangga miskin yang belum mengetahui mengenai penggunaan alat KB. Di Kabupaten Soppeng, terdapat 62,90 persen perempuan berstatus miskin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB pada tahun 2017 masih relatif dapat dikatakan rendah jika

dibandingkan dengan kabupaten kota lain di provinsi Sulawesi Selatan (lihat Tabel 4).

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu mengupayakan perubahan budaya *mindset* atau pola pikir rumah tangga miskin yang cenderung untuk ingin mempunyai anak yang banyak tanpa diimbangi dengan perbaikan ekonomi rumah tangganya. Rumah tangga miskin perlu disadarkan akan pentingnya mengontrol kelahiran anak dalam rumah tangganya. Karena jika hal ini berlangsung terus menerus, maka bukan tidak mungkin kemiskinan juga akan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti kata Suryawati (2005), bahwa kemiskinan bisa muncul karena akibat nilai budaya yang dianut rumah tangga miskin itu sendiri, salah satu budaya tersebut adalah mempunyai banyak anak yang berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Banyaknya anak yang ada di rumah tangga miskin juga berdampak pada kurangnya perhatian kesehatan dan pemenuhan gizi anak mereka. Dilihat dari tabel 3, persentase balita di rumah tangga miskin yang telah mendapat imunisasi di Kabupaten Soppeng sebesar 81,84 persen. Hal ini menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai kabupaten dengan persentase balita yang telah mendapat imunisasi dapat dikatakan masih relative rendah jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4 Persentase Perempuan berstatus Miskin yang Menggunakan Alat KB di Kabupaten Soppeng 2013-2017

Pada Gambar 4 terlihat bahwa dari tahun 2013-2015 persentase perempuan berstatus miskin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB mengalami kenaikan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016, persentasenya kembali naik pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 62,09 persen.

### 3.2.4 Pengeluaran Per Kapita

Makanan telah dijadikan indikator oleh ahli ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti Ernest Engel, yang dikenal dengan hukum Engel, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran masyarakat untuk makanan semakin kecil. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non-makanan. Pergeseran

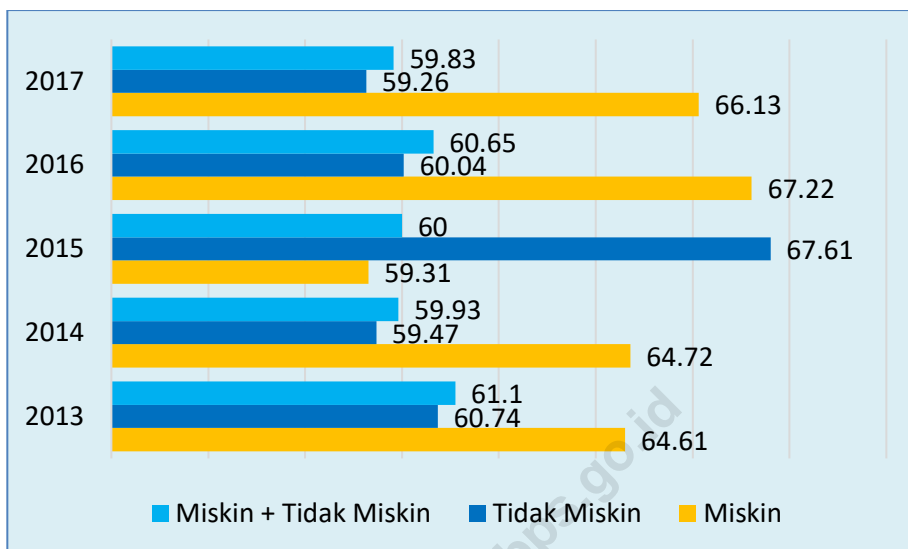


komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. Dengan demikian, pangsa (*share*) pengeluaran makanan rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat. Sehingga pangsa (dalam %) pengeluaran untuk makanan semakin kecil, maka tingkat kemakmuran masyarakat dikatakan makin membaik (Trisnowati dan Budiwinarto, 2013).

Berdasarkan teori di atas, maka kemakmuran masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Soppeng masih bisa ditingkatkan lagi. Hal tersebut bisa dilihat dari pengeluaran penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selain Kota Makassar masih didominasi oleh pengeluaran untuk membiayai makanan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pengeluaran perkapita untuk makanan baik penduduk miskin maupun tidak miskin masih di atas 50 persen, hanya Kota Makassar saja yang persentasenya dibawah 50 persen (lihat Tabel 5).

Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan status miskin penduduk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa persentase pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk yang tergolong miskin lebih besar daripada penduduk tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin lebih memprioritaskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dibandingkan bukan makanan.

Begitu juga dengan Kabupaten Soppeng, sebanyak 66,13 persen pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng, masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk tidak miskin di Kabupaten Soppeng sebesar 59,26 persen.



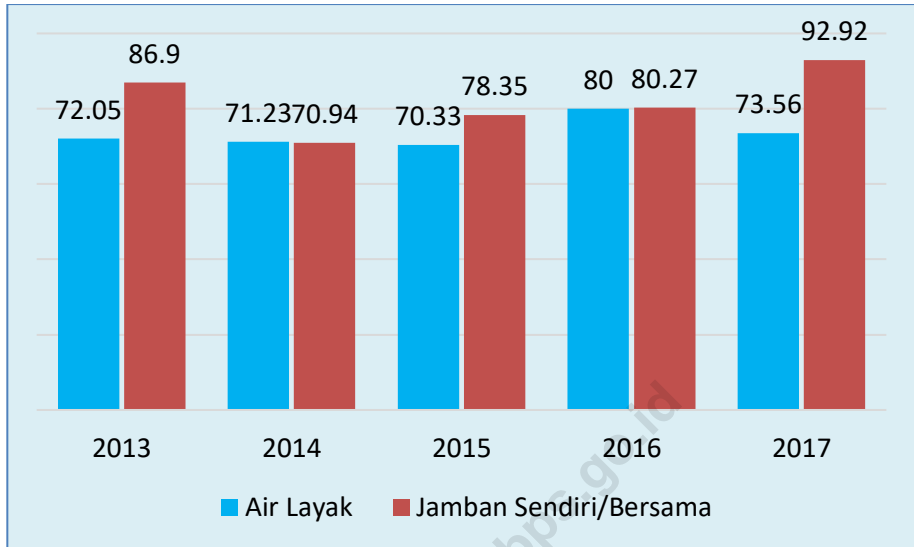
Gambar 5 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, persentase pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Soppeng baik yang tergolong miskin maupun tidak miskin masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan. Pada tahun 2017, angkanya mengalami kenaikan dari 59,31 persen menjadi 67,22 persen. Akan tetapi, pada tahun 2017, persentase pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk Kabupaten Soppeng mengalami penurunan baik yang tergolong miskin maupun tidak miskin. Pada penduduk yang tergolong miskin persentasenya menjadi 66,13 persen dan pada penduduk yang tergolong tidak miskin persentasenya menjadi 59,26 persen.

### 3.2.5. Fasilitas Perumahan

Kondisi perumahan dan akses infrastruktur publik akan berdampak luas terhadap pengembangan potensi dan produktivitas penduduk miskin. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan melihat fasilitas jamban sendiri/bersama dan akses terhadap air bersih (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

Dalam hal kelengkapan fasilitas rumah yang dilihat dari ketersediaan air layak Kabupaten Soppeng termasuk kabupaten yang masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, terdapat sebanyak 73,56 persen rumah tangga miskin yang dapat menyediakan air layak minum bagi anggota rumah tangganya. Persentase ini masih di bawah rata-rata persentase Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 82,67 persen. Jika dilihat dari penggunaan jamban di Kabupaten sudah cukup baik. Terdapat 92,92 persen rumah tangga miskin yang mempunyai fasilitas jamban. Angka ini sudah di atas rata-rata persentase Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 87,97 persen (lihat Tabel 6).



Gambar 6 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

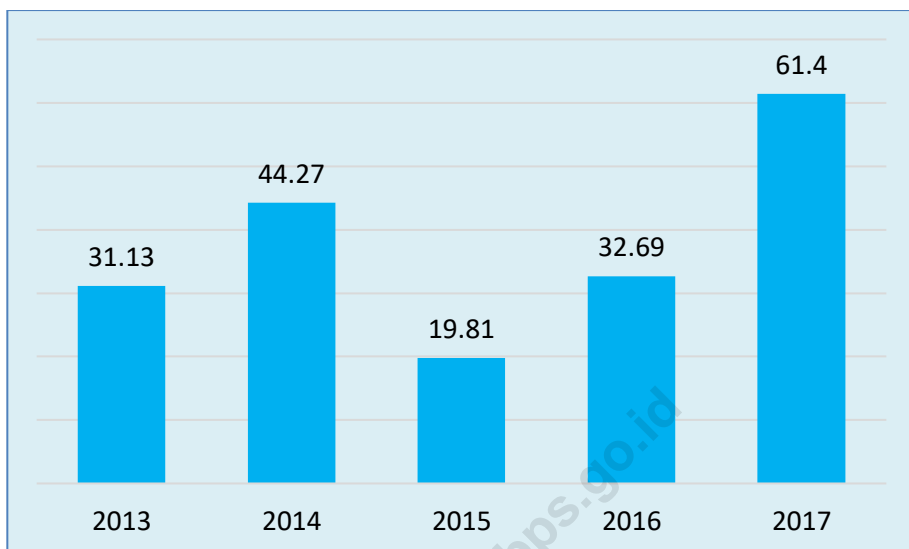
Jika dilihat pada periode tahun 2013-2017 seperti yang terlihat pada Gambar 6 maka dapat diketahui bahwa baik penggunaan air layak dan fasilitas jamban oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng sempat mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, angka persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak mengalami kenaikan dibanding tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri maupun Bersama di Kabupaten Soppeng jumlahnya mencapai 92,92 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri atau bersama dari tahun 2013 sampai tahun 2017, angkanya sempat mengalami penurunan menjadi 73,56 persen.

Haughton dan Khandar (2009) mengatakan kelengkapan fasilitas rumah tangga seperti akses terhadap air layak dan sanitasi akan berpengaruh pada kesehatan anggota rumah tangga, yang merupakan

salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dilihat dari karakteristik sosial rumah tangga. Peningkatan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak dan jamban sendiri/bersama selama 4 tahun terakhir merupakan modal yang bagus dalam upaya perbaikan pola hidup sehat dalam rumah tangga miskin. Hal ini perlu didukung oleh pemerintah Kabupaten Soppeng. Walaupun persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak dan jamban sendiri/bersama di Kabupaten Soppeng masih di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Soppeng perlu terus mengupayakan untuk meningkatkan pengadaan maupun pelayanan kedua fasilitas tersebut.

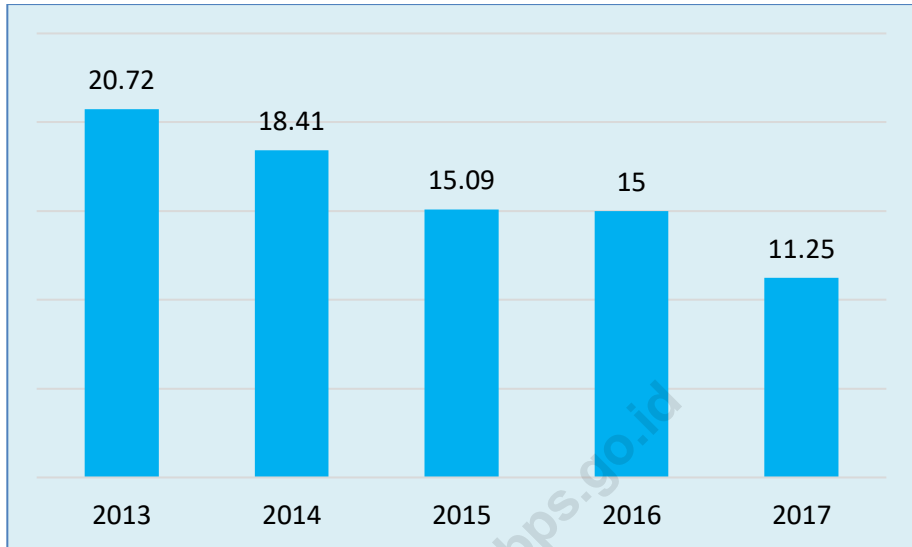
### **3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pada tahun 2017, terdapat sebanyak 61,4 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan raskin dengan rata-rata harga sebesar Rp 2.174,00 per kilonya. Setiap rumah tangga miskin penerima raskin mendapat rata-rata 11,25 kg. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lainnya, Kabupaten Soppeng berada dalam urutan ke-16 dengan persentase rumah tangga miskin penerima raskin terkecil. (lihat Tabel 7).



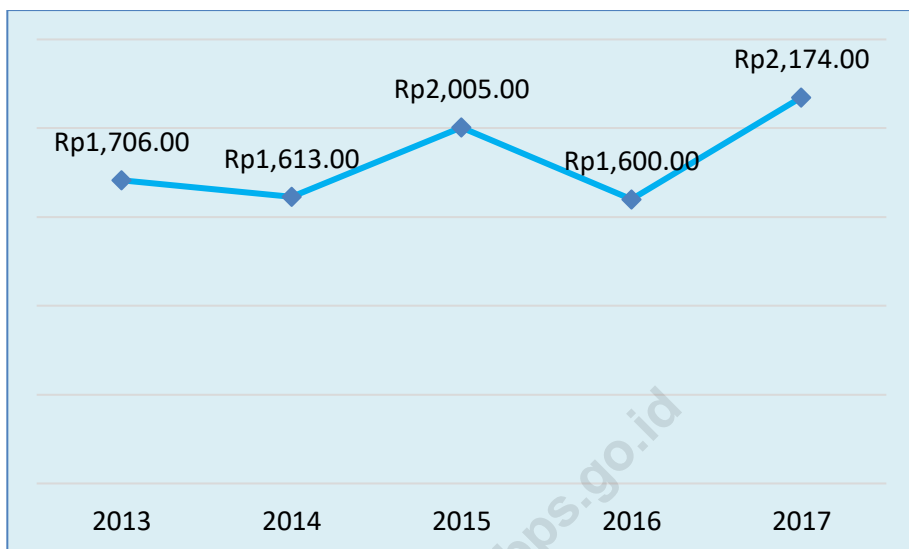
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Pada Gambar 7.1, dapat dikatakan bahwa persentase rumah tangga miskin penerima raskin di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2013 mengalami trend yang menaik, walaupun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan. Dan pada tahun 2017, terjadi kenaikan yang cukup drastic, yaitu dari 32,69 persen menjadi 61,4 persen.



Gambar 7.2 Persentase Rata-rata Jumlah Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah tangga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Apabila dilihat dari Gambar 7.2, dapat diketahui bahwa persentase rata-rata jumlah beras raskin yang dibeli oleh rumah tangga miskin dari tahun 2013-2017 selalu mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2017 persentase rata-rata jumlah raskin yang dibeli menjadi 11,25 persen.



Gambar 7.3 Rata-rata Harga Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah tangga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Dari Gambar 7.3 dapat diketahui bahwa rata-rata harga raskin yang dibeli oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng, selama tahun 2013-2017 fluktuatif. Harga tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 dengan harga mencapai Rp 2.174,00.





• Pada tahun 2017,  
di Kabupaten  
Soppeng  
terdapat **62,09%**

perempuan berstatus miskin usia  
15-49 tahun yang **menggunakan  
alat KB**

## BAB IV

### PENUTUP

Pada tahun 2017 masih ada sekitar 18.760 jiwa atau sekitar 8,29 persen penduduk Kabupaten Soppeng yang tergolong miskin. Jika dilihat dari periode tahun 2013-2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 19.120 orang menjadi 18.760 orang. Pada periode tahun tersebut, angka persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 8,45 persen menjadi 8,29 persen.

Angka indeks ketimpangan kemiskinan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan dan mencapai angka 1,08 persen pada tahun 2017. Ini berarti bahwa kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan relatif kecil, yaitu hanya sebesar 1,08 persen. Sedangkan indeks  $P_2$  mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2017 mencapai angka 0,28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin tidak begitu timpang.

Profil rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2017 yang memiliki keterkaitan dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD atau SMP, yaitu sebesar 50,82 persen.
- b. Ada sebanyak 95,84 persen penduduk miskin yang berumur 15-55 tahun sudah bisa membaca dan menulis aksara tertentu. Bahkan penduduk

miskin yang berumur 15-24 tahun semuanya dapat membaca dan menulis aksara tertentu.

- c. Pada tahun 2017, Angka partisipasi sekolah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng yang berumur 7-12 tahun atau usia sekolah dasar mencapai 100 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin berumur 13-15 tahun atau usia sekolah menengah pertama yang hanya 67,4 persen.
- d. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2013-2015 terlihat terus mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2017 angkanya naik, dan kemudian turun lagi pada tahun 2017 menjadi 33,99 persen.
- e. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng, terdapat 62,09 persen perempuan berstatus miskin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB pada tahun 2017.
- f. Sebanyak 66,13 persen pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017, masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk tidak miskin di Kabupaten Soppeng sebesar 59,26 persen.
- g. Pada tahun 2017, di Kabupaten Soppeng terdapat sebanyak 73,56 persen rumah tangga miskin yang dapat menyediakan air layak minum bagi anggota rumah tangganya dan terdapat 92,92 persen rumah tangga miskin yang mempunyai fasilitas jamban sendiri/bersama.
- h. Pada tahun 2017 terdapat 61,64 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan raskin dengan rata-rata harga sebesar Rp. 2.174,00 per kilonya. Setiap rumah tangga miskin penerima raskin mendapat rata-rata 11,25 kg.



Pada tahun 2017,  
di Kabupaten Soppeng  
terdapat **32,69%**  
rumah tangga miskin  
yang menerima raskin  
dengan rata-rata  
sebanyak **15** kg

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2007). *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. (2018). *Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2018*. Soppeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.
- Cahyo, Agus Dwi. (2017). *Peran Jarak Migrasi pada Model Pengaruh Karakteristik Demografi, Ekonomi, dan Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Migran yang Tinggal di Daerah Perkotaan di Indonesia* [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.

Detik.com

Flaticon.com

Freepik.com

Houghton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC: World Bank.

Irawan, Puguh Bodro, et al. (2017). *Official Statistics Sosial-Kependudukan Dasar*. Bogor: In Media.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rusastra, I Wayan dan Napitupulu, Togar A. (2007). *Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Perdesaan: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan*. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian : 9-22.

Suryawati, Chriswardani. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

Trisnowati, Juni dan Budiwinarto, Kim. (2013). *Kajian Pengaruh Harga dan Pendapatan terhadap Proporsi Pengeluaran Makanan Rumah Tangga (Pendekatan Model Linier Permintaan Lengkap)*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro : 123-134.

Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008* [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.

# LAMPIRAN TABEL

<https://sopriangkab.bps.go.id>

**Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten	Jml Penduduk Miskin (000)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Garis Kemiskinan (Rp/Kap /Bln)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	17,62	13,28	3,74	1,42	310.978
2	Bulukumba	33,10	7,97	1,10	0,26	284.108
3	Bantaeng	17,91	9,66	1,43	0,33	234.286
4	Jeneponto	55,35	15,40	2,84	0,77	315.702
5	Takalar	26,99	9,24	1,68	0,40	299.721
6	Gowa	62,77	8,42	1,42	0,39	333.002
7	Sinjai	22,25	9,24	1,04	0,19	250.551
8	Maros	38,50	11,14	2,58	0,86	348.726
9	Pangkajene Dan Kepulauan	53,38	16,22	3,04	0,88	268.367
10	Barru	16,76	9,71	1,43	0,32	289.371
11	Bone	77,13	10,28	1,56	0,39	272.555
12	Soppeng	18,76	8,29	1,25	0,28	225.936
13	Wajo	29,19	7,38	1,53	0,47	264.376
14	Sidenreng Rappang	15,72	5,32	0,85	0,21	276.558
15	Pinrang	31,43	8,46	1,62	0,44	256.054
16	Enrekang	26,71	13,16	1,83	0,43	283.653
17	Luwu	49,80	14,01	2,96	0,92	281.195
18	Tana Toraja	29,18	12,62	2,15	0,53	261.573
19	Luwu Utara	44,04	14,33	2,02	0,46	299.339
20	Luwu Timur	21,94	7,66	1,60	0,50	289.214
21	Toraja Utara	32,85	14,41	2,20	0,52	408.827
22	Kota Makassar	68,19	4,59	0,64	0,13	366.430
23	Kota Parepare	8,07	5,70	0,85	0,24	292.685
24	Kota Palopo	15,44	8,78	1,75	0,60	274.319
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>813,07</b>	<b>9,38</b>	<b>1,72</b>	<b>0,46</b>	<b>283.461</b>



**Tabel 2** **Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan			AMH		APS	
		<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+	15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kepulauan Selayar	34,79	45,55	19,66	100,00	95,63	96,79	100,00
2	Bulukumba	43,08	43,78	13,15	100,00	96,62	100,00	90,62
3	Bantaeng	53,05	38,79	8,15	100	83,11	100	78,47
4	Jeneponto	45,17	43,25	11,58	98,50	85,44	100,00	67,23
5	Takalar	38,42	37,95	23,63	100	81,77	94,04	74,37
6	Gowa	30,30	57,29	12,41	100,00	89,51	91,52	98,53
7	Sinjai	37,00	51,25	11,75	100	91,29	96,78	92,02
8	Maros	36,76	45,74	17,49	100,00	93,11	100,00	100,00
9	Pangkajene dan Kepulauan	29,70	55,13	15,17	95,8	89,66	97,98	81,92
10	Barru	48,92	36,89	14,19	100,00	98,18	100,00	94,51
11	Bone	40,49	55,05	4,46	96,36	94,09	100	84,98
12	Soppeng	42,03	50,82	7,15	100,00	95,84	100,00	67,40
13	Wajo	47,88	50,46	1,66	100	82,83	100	43,95
14	Sidenreng Rappang	30,07	48,41	21,52	100,00	92,86	98,32	80,74
15	Pinrang	27,72	53,43	18,85	96,09	96,41	93,62	95,23
16	Enrekang	29,47	49,93	20,59	100,00	99,36	100,00	100,00
17	Luwu	25,77	59,58	14,65	98,5	94,44	100	87,12
18	Tana Toraja	49,23	41,83	8,94	100,00	87,45	99,29	96,79
19	Luwu Utara	31,42	55,98	12,60	95,5	88,06	97,75	85,78
20	Luwu Timur	36,90	52,07	11,03	92,41	88,80	94,21	100,00
21	Toraja Utara	45,09	46,32	8,59	100	88,36	100	93,5
22	Kota Makassar	8,79	63,21	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Kota Parepare	26,70	46,37	26,93	100	91,91	100	100
24	Kota Palopo	14,24	58,20	27,56	100,00	99,55	100,00	100,00
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>34,97</b>	<b>51,04</b>	<b>13,99</b>	<b>97,91</b>	<b>91,11</b>	<b>98,56</b>	<b>86,16</b>

**Tabel 3**      **Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Sektor Bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Status Bekerja			Sektor Bekerja		
		Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kepulauan Selayar	39,85	45,64	14,51	39,85	33,37	26,78
2	Bulukumba	48,75	39,60	11,65	48,75	30,39	20,86
3	Bantaeng	33,46	58,33	8,21	33,46	45,15	21,39
4	Jeneponto	33,46	43,58	22,96	41,29	40,09	18,62
5	Takalar	50,65	35,18	14,17	50,65	27,10	22,25
6	Gowa	47,58	39,29	13,13	47,58	23,08	29,34
7	Sinjai	46,62	43,04	10,34	46,62	43,91	9,47
8	Maros	46,81	37,23	15,96	46,81	28,58	24,61
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,67	23,56	20,77	55,67	17,15	27,18
10	Barru	61,74	29,91	8,35	61,75	22,84	15,41
11	Bone	39,97	50,33	9,70	39,97	41,34	18,69
12	Soppeng	33,99	61,14	4,87	33,99	55,74	10,27
13	Wajo	52,51	41,93	5,56	52,51	36,36	11,13
14	Sidenreng Rappang	60,90	24,73	14,37	60,90	20,12	18,98
15	Pinrang	54,77	29,15	16,08	54,77	26,43	18,8
16	Enrekang	32,25	65,74	2,01	32,25	62,30	5,45
17	Luwu	49,39	45,38	5,23	49,39	41,00	9,61
18	Tana Toraja	33,78	64,93	1,29	33,78	64,93	1,29
19	Luwu Utara	38,23	55,59	6,18	38,23	48,66	13,11
20	Luwu Timur	41,40	48,60	10,00	41,40	49,62	8,98
21	Toraja Utara	24,82	68,65	6,53	24,82	64,53	10,65
22	Kota Makassar	54,82	19,90	25,28	54,82	0,00	45,18
23	Kota Parepare	61,62	21,44	16,94	61,62	4,92	33,46
24	Kota Palopo	56,01	14,35	29,64	56,01	7,19	36,8
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>45,71</b>	<b>42,04</b>	<b>12,25</b>	<b>45,71</b>	<b>34,38</b>	<b>19,91</b>

**Tabel 4**            **Persentase Perempuan berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Balita di Rumah Tangga Miskin yang telah Diimunisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Pengguna Alat KB	Balita yang Telah Diimunisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	66,43	91,52
2	Bulukumba	68,68	64,71
3	Bantaeng	67,06	65,5
4	Jeneponto	76,71	81,69
5	Takalar	78,08	95,22
6	Gowa	78,01	68,72
7	Sinjai	80,08	73,66
8	Maros	71,64	86,75
9	Pangkajene dan Kepulauan	71,75	77,08
10	Barru	43,91	100
11	Bone	60,41	83,89
12	Soppeng	62,09	81,84
13	Wajo	65,29	100
14	Sidenreng Rappang	70,07	94,22
15	Pinrang	71,08	81,71
16	Enrekang	73,61	99,63
17	Luwu	56,74	81,29
18	Tana Toraja	70,85	100
19	Luwu Utara	76,79	98,98
20	Luwu Timur	68,54	100
21	Toraja Utara	68,58	90,19
22	Kota Makassar	67,15	91,28
23	Kota Parepare	35,97	92,43
24	Kota Palopo	38,1	91,53
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>68,14</b>	<b>85,06</b>

**Tabel 5**                    **Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	61,27	61,30	61,30
2	Bulukumba	66,85	60,08	60,62
3	Bantaeng	59,93	52,56	53,27
4	Jeneponto	66,67	64,32	64,68
5	Takalar	63,49	55,72	56,44
6	Gowa	62,94	57,31	57,78
7	Sinjai	62,92	56,31	56,92
8	Maros	59,75	52,71	53,51
9	Pangkajene dan Kepulauan	63,84	56,90	58,02
10	Barru	59,25	54,46	54,93
11	Bone	63,17	56,20	56,91
12	Soppeng	66,13	59,26	59,83
13	Wajo	63,75	55,03	55,67
14	Sidenreng Rappang	68,12	57,66	58,22
15	Pinrang	63,45	58,93	59,32
16	Enrekang	60,71	57,83	58,21
17	Luwu	61,94	58,36	58,86
18	Tana Toraja	64,80	60,47	61,02
19	Luwu Utara	60,48	56,00	56,64
20	Luwu Timur	65,38	53,02	53,96
21	Toraja Utara	66,96	59,76	60,80
22	Kota Makassar	60,18	47,55	48,13
23	Kota Parepare	59,38	53,05	53,41
24	Kota Palopo	60,61	52,30	53,03
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>63,06</b>	<b>55,35</b>	<b>56,07</b>

**Tabel 6**                    **Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	73,13	64,48
2	Bulukumba	71,13	90,12
3	Bantaeng	52,68	84,17
4	Jeneponto	93,50	71,69
5	Takalar	98,18	84,75
6	Gowa	82,39	91,82
7	Sinjai	76,38	89,00
8	Maros	80,13	86,36
9	Pangkajene dan Kepulauan	78,37	80,66
10	Barru	68,09	86,58
11	Bone	72,02	83,64
12	Soppeng	73,56	92,92
13	Wajo	88,04	92,49
14	Sidenreng Rappang	94,69	88,45
15	Pinrang	85,28	84,59
16	Enrekang	57,60	88,77
17	Luwu	74,22	73,75
18	Tana Toraja	72,28	89,96
19	Luwu Utara	70,95	80,96
20	Luwu Timur	82,79	84,21
21	Toraja Utara	69,74	94,00
22	Kota Makassar	99,72	97,84
23	Kota Parepare	96,99	92,68
24	Kota Palopo	94,56	95,48
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>82,67</b>	<b>87,97</b>

**Tabel 7**                    **Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Ruta Miskin Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	44,44	10,15	1 919
2	Bulukumba	55,39	10,57	1 926
3	Bantaeng	77,80	14,83	1 743
4	Jeneponto	86,65	15,71	1 807
5	Takalar	50,91	12,87	1 642
6	Gowa	29,06	15,20	1 711
7	Sinjai	40,35	14,98	1 704
8	Maros	10,28	16,36	748
9	Pangkajene dan Kepulauan	42,67	15,00	1 680
10	Barru	57,57	15,00	1 651
11	Bone	67,26	10,44	1 834
12	Soppeng	61,40	11,25	2 174
13	Wajo	49,73	14,31	1 807
14	Sidenreng Rappang	23,42	15,00	2 075
15	Pinrang	31,91	10,75	1 762
16	Enrekang	82,83	8,67	1 710
17	Luwu	45,19	11,30	1 656
18	Tana Toraja	77,55	15,00	1 739
19	Luwu Utara	36,82	8,51	0
20	Luwu Timur	78,15	11,96	1 783
21	Toraja Utara	66,52	3,96	1 865
22	Kota Makassar	24,57	6,18	1 994
23	Kota Parepare	69,38	6,72	2 117
24	Kota Palopo	0,00	9,63	2 198
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>50,08</b>	<b>5,08</b>	<b>2 278</b>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

ISBN 978-602-5551-25-3



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Salotungo samping kantor bupati, Watansoppeng

Email: [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id) Homepage: <https://soppengkab.bps.go.id>